

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam menjalankan operasional sebuah perusahaan banyak faktor yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional tersebut agar dapat berjalan secara maksimal dan dapat mencapai suatu tujuan perusahaan. Pada umumnya tujuan dari suatu perusahaan adalah mendapatkan laba yang maksimal dalam setiap periodenya agar kelangsungan hidup perusahaan dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan lainnya.

Salah satu faktor untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan tersebut adalah dengan adanya pengadaan dan pemakaian aset tetap. Adapun pengadaan aset tetap perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan adalah aset yang memiliki masa pemakaian yang lama atau lebih dari satu periode dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Aset tetap merupakan bagian terpenting dalam laporan keuangan, bahkan untuk entitas yang *capital intensif* jumlah aset tetap ini dominan dibandingkan dengan aset yang lain. Penggunaan aset tetap yang efisien menentukan kinerja entitas. Pada saat entitas menambah modalnya dalam bentuk utang, aset tetap sangat diperhatikan dalam menentukan kelayakan dan jumlah kredit yang akan diberikan, karena aset tetap digunakan sebagai jaminan kredit (Martani, 2011).

Masalah utama dalam akuntansi aset tetap salah satunya adalah mengenai pengakuan aset tetap (IAI, 2015). Pada PSAK 16 (Revisi 1994) tidak memperkenankan revaluasi aktiva tetap (IAI, 2002). Sedangkan menurut PSAK No. 16 (revisi 2012) suatu perusahaan harus memilih antara model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi pengukuran atas aset tetap perusahaan tersebut (IAI, 2015).

Umumnya aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, selama masa manfaat aset tetap disusutkan sehingga nilainya semakin lama semakin kecil. Namun penggunaan harga perolehan sebagai kebijakan akuntansi aset menjadikan beberapa nilai aset tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Penggunaan harga perolehan menjadikan nilai aset tetap kehilangan relevansinya karena tidak mencerminkan nilai terkini dari aset yang dimiliki perusahaan. Agar relevansinya dari nilai aset tetap terjaga, perlu dipilih suatu kebijakan akuntansi atas aset tetap yang mencerminkan nilai sesungguhnya dari aset tetap yaitu kebijakan revaluasi aset tetap (Martani, 2012).

Selain dari harga perolehan, kebijakan atas aktiva tetap lain yang diperkenankan menurut PSAK 16 (2015) tentang *Plant, Property* dan *Equitment* adalah kebijakan revaluasi aktiva tetap. Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut dipasaran. Kebijakan ini dikatakan dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aset, karena revaluasi aktiva tetap dalam praktiknya mencatat aset menggunakan nilai pasar dari aset tersebut, sehingga aset menjadi relevan. Nilai

aset yang disajikan menjadi nilai aset saat ini, bukan nilai aset saat perolehan (Anderson, 2015).

Baridwan (2008) mengatakan untuk aktiva tetap apabila harga-harga sudah berubah dalam jumlah besar, maka rekening-rekening aktiva tetap uang memakai harga perolehan dimasa lalu sudah tidak menunjukkan keadaan yang riil dari aktiva tersebut. Penyimpangan ini tentu beralasan, melihat kondisi perekonomian Indonesia yang selama lima tahun terakhir saja inflasinya sangat berfluktuasi dimana inflasi tahun 2014 mencapai 8.3%, sehingga nilai uang tidak lagi stabil. Hal ini akan berpengaruh terhadap nilai aktiva yang dimiliki perusahaan. Selain kondisi tersebut, ada banyak keuntungan jika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Menurut Seng dan Su (2010), keuntungan revaluasi aset tetap antara lain menurunkan biaya kontrak utang (*Debt Contracting*), menurunkan biaya politis dan asimetri informasi.

Revaluasi aset yang tertuang dalam kebijakan baru pemerintah membuka peluang entitas bisnis di Indonesia untuk memperbaiki neracanya. Beberapa BUMN kini mulai memikirkan langkah itu guna untuk memuluskan kinerjanya di masa depan. Meskipun tidak berdampak langsung pada naiknya *cashflow*, revaluasi akan meningkatkan *leverage* perusahaan untuk kemampuan ekonomis di masa depan. Ditambah lagi adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah bagi perusahaan yang melakukannya pada sebelum tahun 2016. Kebijakan yang disebut Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V itu telah diumumkan Pemerintah Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober 2015 lalu. Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid lima ini guna mendorong perekonomian dalam negeri.

Paket kebijakan ini menitikberatkan pada insentif yang diberikan pemerintah terkait pengurangan pajak. Insentif keringanan pajak dalam revaluasi aset tetap entitas, baik di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta. Kebijakan ini diharapkan berimplikasi seperti sebuah *blessing in disguise* di masa serangan panceklik ekonomi global. Dengan revaluasi, aset berpeluang menggembung dan menggerakkan leverage sehingga perusahaan dapat mengajukan fasilitas pinjaman baru untuk mendanai aktifitas operasional ataupun langkah ekspansi bisnis yang dapat meningkatkan kinerja usahanya (Pinnarwan, 2015)

Ketika Pemerintah kemarin meluncurkan Paket Kebijakan Jilid V, salah satu poin kebijakan tersebut adalah insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset, dimana jika sebelumnya perusahaan dikenakan pajak PPh 10% untuk kenaikan nilai aset karena revaluasi (selisih antara nilai aset sebelum dan sesudah revaluasi dianggap sebagai *income* perusahaan), maka sekarang pajak tersebut dipangkas menjadi hanya 3 – 6% saja. Kebijakan ini diharapkan akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menghitung kembali nilai aset-asetnya seperti tanah, bangunan dll (revaluasi), dimana nilai aset-aset tersebut biasanya akan naik setelah revaluasi, hingga pada akhirnya menaikkan nilai aset bersih atau ekuitas perusahaan itu sendiri secara keseluruhan. Jadi selain mendapat diskon pajak penghasilan, pemegang saham juga dapat tambahan saham yang bukan objek PPh, dan secara fiskal penghasilan neto akan lebih kecil dibanding tahun lalu. Keuntungan lain dari revaluasi adalah bahwa dengan

"tambahan nilai aktiva" maka perusahaan bisa menambah hutang ke bank untuk modal kerja atau menaikkan nilai saham sebelum *initial publik offering* (IPO).

Revaluasi aset tetap juga akan menghasilkan beban penyusutan yang berbeda dibandingkan dengan jika tidak melakukan revaluasi. Penerapan revaluasi aset tetap akan menambah nilai dari aset tersebut. Adanya penambahan nilai aset akibat revaluasi tentu saja akan menambah nilai penyusutannya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka laba fiskal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut juga akan berubah bila melakukan kegiatan revaluasi aset tetap. Berubahnya laba fiskal perusahaan juga akan berdampak pada perubahan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan karena beban pajak penghasilan dihitung berdasarkan laba fiskal. Jika laba fiskal perusahaan menjadi lebih kecil karena adanya penambahan nilai penyusutan, maka nilai pajak yang dibayarkan juga akan menjadi lebih kecil (Waluyo, 2010). Dengan kata lain revaluasi aset tetap merupakan salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan dalam perencanaan pajaknya (*tax planning*). Sesuai dengan pernyataan Suryani (2006) tujuan dari perencanaan pajak yaitu untuk mengefisiensikan jumlah pajak terhutang melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan. (Suryani, 2006). Jadi, perencanaan pajak melalui penilaian kembali aktiva tetap dapat mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara laba komersial dan laba kena pajak.

Salah satu perusahaan yang diketahui telah melakukan revaluasi aset tetap adalah PT. Gudang Garam Tbk. PT. Gudang Garam Tbk adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri rokok. PT. Gudang Garam sejak

awal berdirinya telah memiliki aktiva tetap berupa tanah, bangunan kantor dan gudang, mesin-mesin, kendaraan dan inventaris kantor yang merupakan faktor pendukung bagi kelangsungan kegiatan operasional perusahaan. Akibat adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia akhir-akhir ini, aktiva tetap tersebut dirasakan perlu untuk direvaluasi atau dilakukan penilaian kembali guna kewajaran dalam penyajian laporan keuangan, khususnya dalam kaitannya antara biaya-biaya yang timbul akibat penggunaan aktiva tetap dengan penghasilan. Dengan pelaksanaan revaluasi maka diperoleh nilai pasar wajar aktiva tetap yang baru sebesar Rp 5.210.927 juta dimana dari nilai pasar wajar aktiva tetap dapat diketahui nilai dari selisih penilaian kembali aktiva tetap, yaitu sebesar Rp.3.018.962 juta. Jadi aset tetap PT. Gudang Garam naik sekitar 57% setelah perusahaan ini melakukan revaluasi aset tetap.

PT Krakatau Steel Tbk juga telah melakukan revaluasi aset tetap pada kelompok aset tanah perusahaan pada September 2015. Hasil revaluasi aset tetap sudah dimasukkan dan tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian perseroan pada 30 September 2015. Hasil penilaian kembali atas aktiva tetap perseroan yang dilakukan oleh ketiga KJPP tersebut adalah aset tetap pada kelompok aset tanah perseroan bertambah dari US\$ 33.107.000 jika tanpa revaluasi menjadi US\$ 1.067.950.000 atau terdapat selisih nilai buku dengan nilai wajar sebesar US\$ 1.034.843.000. Sedangkan dari penilaian kembali atas aset lain-lain tanah, nilai bukunya bertambah dari US\$ 446.000 jika tanpa revaluasi menjadi US\$ 62.588.000 atau terdapat selisih nilai buku dengan nilai wajar sebesar US\$ 62.142.000. Dengan demikian, perseroan memperoleh selisih nilai

buku dengan nilai wajar sebesar US\$ 1.096.985.000. Dampak atas revaluasi ini dibukukan sebagai penghasilan komprehensif lainnya, sehingga perseroan dapat mencatat laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada entitas induk per 30 September 2015 sebesar USD 910,9 juta. Sebagai konsekuensinya nilai buku ekuitas PTKS bertambah 102,6% menjadi USD 1.794,9 juta dibandingkan 31 Desember 2014 sebesar USD 885,9 juta.

Melihat kondisi dan contoh kasus di atas, penggunaan metode revaluasi bisa dikatakan menjadi alternatif yang lebih baik bagi perusahaan dalam melakukan pencatatan terhadap nilai aset tetap. Selain dapat menunjukkan nilai yang relevan dari aset tetap, penggunaan metode revaluasi meningkatkan nilai aset tetap perusahaan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kinerja perusahaan. Oleh karenanya, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan baik pemegang saham, manajemen, kreditur, maupun pengguna laporan keuangan lain dapat lebih mudah dalam melakukan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan.

Peneliti-peneliti sebelumnya menguji faktor-faktor yang memotivasi manajer memilih untuk merevaluasi aset tetap, diantaranya faktor perkontrakan seperti *leverage* (Seng dan Su, 2010; Piera, 2007; Jaggi dan Tsui, 2001; Lin dan Peasnell, 2000a, 2000b; Cotter, 1999; Brown et al. 1992; Whittered dan Chan, 1992; Iatridis dan Kilirgiotis, 2011; Andison, 2015; Manuhuruk dan Aria, 2015; Yulistia, 2015; Khairati, 2012), faktor politis seperti ukuran perusahaan (Seng dan Su, 2010; Piera, 2007; Lin dan Peasnell, 2000a, 2000b; Brown et al. 1992, Iatridis dan Kilirgiotis, 2011; Manuhuruk dan Aria, 2015; Yulistia, 2015; Khairati, 2012),

asimetri informasi seperti *fixed asset intensity*, revaluasi tahun sebelumnya (Seng dan Su, 2010; Lin dan Peasnell, 2000a; Brown et al. 1992; Iatridis dan Kilirgiotis, 2011; Manuhuruk dan Aria, 2015; Yulistia, 2015; Khairati, 2012), signaling (Piera, 2007; Jaggi dan Tsui, 2001; Graeremyck dan Veugelers, 1999) dan kepemilikan saham, ekspor perusahaan (Piera, 2008), akuisisi (Iatridis dan Kilirgiotis, 2011).

Penelitian di luar negeri membuktikan bahwa manajer perusahaan memilih merevaluasi aset dipengaruhi oleh faktor-faktor, diantaranya faktor perkontrakan, faktor politis dan faktor asimetri informasi yang terkait dengan perusahaan (Seng dan Su, 2010), meskipun Seng dan Su (2010) hanya menemukan faktor politis (size) yang mempengaruhi pilihan perusahaan untuk merevaluasi aset. Di Indonesia, penelitian sebelumnya belum berhasil membuktikan faktor perkontrakan, politis dan asimetri informasi terhadap pilihan revaluasi aset (Yulistia, dkk, 2012).

Sedangkan di Indonesia, beberapa peneliti juga telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan untuk merevaluasi aset tetap seperti faktor Likuiditas, *fixed asset intensity*, *market to book ratio*, leverage, arus kas operasi dan ukuran perusahaan (Nurjanah, 2013; Yulistia dkk, 2012; Andison, 2015; Manuhuruk dan Farahmita, 2015).

Penelitian ini difokuskan pada revaluasi aset yang menimbulkan kenaikan pada aset tetap perusahaan (*upward revaluation*) karena akan menambah nilai aset tetap di laporan posisi keuangan perusahaan. Perusahaan melakukan *upward*

revaluation untuk menyajikan situasi keuangan yang menguntungkan, menarik minat investor dan memperkuat peluang investasi mereka (Iatridis, 2011).

Penelitian ini juga difokuskan pada perusahaan sektor industri manufaktur. Karena pertumbuhan sektor industri manufaktur memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2012 industri manufaktur menyumbang 20,8% atau sekitar Rp 1.714,3 triliun dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp 8.241,9 triliun. Kontribusi sektor manufaktur juga diharapkan meningkat menjadi 40% dalam beberapa tahun ke depan (Kurniawan dalam Investor Daily, 2013). Selain itu, industri sektor manufaktur cenderung memiliki aset yang banyak (Gillaspea, 2001). Dengan semakin banyaknya aset yang dimiliki oleh perusahaan di sektor ini, maka akan memacu perusahaan untuk melakukan revaluasi pada aset tetapnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik sekali untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH LIKUIDITAS, *FIXED ASSETS INTENSITY*, *MARKET TO BOOK RATIO*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN REVALUASI ASET TETAP”**.

1.2 Batasan Masalah

Permasalahan yang diangkat penulis adalah bagaimana pengaruh likuiditas, *fixed assets intensity*, *market to book ratio*, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. Penulis membatasi

penelitian ini hanya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah likuiditas berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap?
- 2) Apakah *fixed assets intensity* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap?
- 3) Apakah *market to book ratio* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap?
- 4) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *fixed assets intensity* terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap.

- 3) Untuk mengetahui pengaruh *market to book ratio* terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan melakukan revaluasi aset tetap.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat pada aspek :

1) Teoritis

Bagi penulis dan peneliti lain, sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi keuangan dan perpajakan agar semakin memahami bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan memahami bagaimana dampak terhadap perpajakan menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia.

2) Praktis

- a. Perusahaan, agar dapat memberikan kontribusi berupa saran bagi pihak manajemen dan sebagai bahan masukan atas evaluasi yang dilakukan terhadap perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Selain itu tujuan yang lainnya ialah menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan *tax planning* (perencanaan pajak), mengingat salah satu tujuan revaluasi aset tetap adalah meminimumkan beban pajak penghasilan.
- b. Investor, merupakan informasi yang berguna bagi investor maupun calon investor untuk menanamkan modalnya baik dalam perspektif jangka

pendek maupun jangka panjang. Dan menjadi informasi dan dorongan bagi investor juga untuk lebih menyelidiki motif perusahaan melakukan revaluasi aset tetap

- c. Pemerintah, merupakan informasi yang berguna bagi pemerintah untuk memahami ada indikasi terselubung adanya motif lain jika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap.